

**KEBIJAKAN *CENSORSHIP* TIONGKOK TERHADAP PERUSAHAAN
MULTINASIONAL DALAM BIDANG ICT (*INFORMATION COMMUNICATION
TECHNOLOGIES*) (STUDI KASUS GOOGLE INC.)**

*The Tiongkok Censorship Policy Towards Multinational Companies In Field Of ICT
(Information Communication Technologies) (Google inc Case Study)*

**Muhammad Haikal
44313034**

**Skripsi ini dibawah bimbingan :
Dewi Triwahyuni S,IP., M.Si**

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Komputer Indonesia, Jl. Dipatiukur 112-114 Bandung, 40132, Indonesia

Email:

d.grace.haikal@gmail.com

Abstract

This study focuses on the impact of censorship policy implementation with Tiongkoknese government activities against Google Inc. in Tiongkok. The Tiongkoknese government has enforced strict censorship of google which is a multinational corporation with its main product of web-based search engine that provides information and news in general and is freely accessible to Internet users, but the information must be done first through a screening process conducted by the Tiongkoknese government, if the keyword in the input in the search engine service contains a negative view of the government, then the information will be in search is blocked by the Tiongkoknese government and disappear from google search.

Keywords : Tiongkok, Google, Conflict, Censorship

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada dampak Implementasi kebijakan *censorship* dengan kegiatan pemerintah tiongkok terhadap Google Inc. di Tiongkok. Pemerintah Tiongkok telah memberlakukan penyensoran ketat terhadap google yang merupakan perusahaan multinasional dengan produk utamanya mesin pencari berbasis web yang menyediakan informasi dan berita secara umum dan dapat diakses secara bebas oleh pengguna internet, namun informasi tersebut harus dilakukan terlebih dahulu melalui proses penyaringan yang dilakukan pemerintah Tiongkok, jika kata kunci yang di input di layanan mesin pencari tersebut berisi pandangan negatif terhadap pemerintah, maka informasi yang akan di cari tersebut diblokir oleh pemerintah Tiongkok dan menghilang dari pencarian google.

Kata kunci: Indonesia, *Wonderful Indonesia*, Jepang, Wisatawan

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini dunia internasional menjadi lebih transparan dengan hadirnya kecanggihan teknologi informasi yang berkembang dengan pesat, teknologi informasi yang paling menonjol adalah internet. Dengan adanya internet ini memberikan kemudahan dalam mengakses informasi serta berkomunikasi. Negara-negara di dunia memanfaatkan kemudahan ini, terlebih dalam kemudahan pertukaran informasi yang dapat dilakukan hanya dalam hitungan detik. Teknologi merupakan salah satu unsur utama dari kebudayaan manusia. Tidak terkecuali Tiongkok yaitu negara terbesar Asia ini juga menikmati kecanggihan teknologi informasi, dan dalam hal ini Tiongkok menjadi negara terbesar pengguna internet.

Google merupakan sebuah MNC (Multi National Corporation) yang berpusat di Kota California, Amerika Serikat yang memiliki anak perusahaan hampir di seluruh negara di dunia (diakses <https://id.wikipedia.org/wiki/Google> pada tanggal 8 April 2017). Produk utama dari perusahaan Google sendiri adalah jasa dan produk internet. MNC dalam hubungan internasional merupakan aktor yang dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan aktor negara (diakses, <https://hiluscious.com/aktor-aktor-dalam-hubungan-internasional-hi> diakses pada tanggal 8 April 2017) maka Google dapat dikatakan sebagai sebuah MNC dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Tiongkok menyangkut censorship. Google yang merupakan non-state actor tetapi pengaruhnya bisa melebihi dari state actor dalam dunia internasional. Dengan berada di bawah tangan Negara super power yaitu Amerika, Google menguasai market share dunia dalam bidang search engine.

Perusahaan Google yang berada di Tiongkok terdesak dengan dikeluarkannya White paper – The Internet in Tiongkok yang menyinggung tentang kebijakan Censorship oleh pemerintah Tiongkok pada tahun 2011,

white paper tersebut mengatur internet dengan hukum dan peraturan, censorship dilakukan diatas nama kebebasan berinternet dan keamanan negara. Ini Tentu saja sebuah propaganda yang dilakukan pemerintah Tiongkok, sebuah kebijakan yang terlihat sebagai kebijakan dalam negeri padahal merupakan sebuah kebijakan luar negeri, dan tentu saja dalam konteks karya tulis ini ditujukan untuk Google yang notabene merupakan MNC terbesar di bidang Teknologi Informasi. Mengutip dari White paper Tiongkok, pada point 4 yang bertema (Basic Principles and Practice of Internet Administration), dikatakan dalam white paper yakni

Undang-Undang Republik Rakyat Tiongkok tentang perlindungan anak di bawah umur menetapkan bahwa negara melarang segala kalangan untuk memproduksi, menjual, menyewakan, atau menyediakan publikasi elektronik lain dan informasi internet yang mengandung pornografi, kekerasan, pembunuhan, teror, perjudian atau konten lainnya yang berbahaya bagi kecil (white paper - Internet China 2011, hal 8). Berdasarkan isi White Paper tersebut bisa menjadi dasar atas sensoran yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok terhadap Google. Kegiatan censorship yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok dilakukan di wilayah Internasional yaitu cyber space yang belakangan ini menjadi wilayah yang lebih penting di bandingkan oleh wilayah fisik dari sebuah negara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas masalah dari penelitian merumuskan masalah sebagai berikut:

Rumusan Masalah Mayor

“Bagaimana dampak kebijakan censorship yang diberlakukan Tiongkok terhadap google.inc di Tiongkok ?

Rumusan Masalah Minor

Berdasarkan dari uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa

masalah terkait penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apa tindakan Google.inc terkait *copyright* yang dilakukan oleh Tiongkok ?
2. Apa saja kerugian yang di alami oleh Google.inc terkait *copyright* yang di lakukan oleh Tiongkok ?
3. Bagaimana perkembangan dari kebijakan *copyright* yang di lakukan oleh Tiongkok terhadap Google.inc ?

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional merupakan studi tentang persoalan-persoalan luar negeri dan isu-isu global di antara negara-negara dalam sistem internasional. Hubungan internasional sering disamakan dengan studi internasional, walaupun sama-sama mempelajari hubungan antar negara. Dari sejarah perkembangannya studi hubungan internasional bersifat interdisipliner, yaitu dimana hubungan internasional tidak dapat dilepaskan dari aspek-aspek ilmu-ilmu sosial lain yang menjadi pembentuknya dengan sifat keilmuannya saling timbal balik. Dari sejarah perkembangan hubungan internasional, secara umum dapat dinyatakan bahwa ilmu hubungan internasional lahir dengan tujuan untuk mencegah perang dan membangun perdamaian. Sehingga secara serius terdapat upaya-upaya untuk memunculkan ilmu yang benar-benar mandiri (Darmayadi, 2015:12).

Hubungan Internasional didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antar beberapa faktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu (Perwita&Yani, 2014: 4).

2.2 Perkembangan Konsep Keamanan

Konsep keamanan adalah hal yang sangat penting dibalik kemajuan pesatnya teknologi informasi dan komunikasi di dunia. Setiap suatu teknologi berkembang, maka kita pun harus memikirkan konsep keamanan yang handal, karena di jaman ini banyak informasi-informasi penting yang disimpan dengan mengandalkan teknologi-teknologi tersebut. Konsep keamanan harus selalu dipikirkan karena berhubungan erat dengan kebergunaan suatu sistem. Karena, jika suatu sistem memiliki keamanan yang buruk, maka akan sedikit orang yang menggunakan sistem tersebut.

Masalah keamanan merupakan persoalan yang penting bagi seluruh negara di dunia, dan bahkan tidak menutup kemungkinan di dalam pelaksanaan politik luar negeri dan kepentingan nasional masing-masing negara mencantumkan keamanan sebagai salah satu yang penting untuk dibahas dan menjadi tujuan nasional. Di era modern saat ini, perkembangan teknologi yang semakin meningkat mengakibatkan meningkatnya mobilitas sosial, juga dapat mengakibatkan gejala-gejala perubahan internasional di bidang kejahatan internasional (Wardoyo, 2015 : 47).

2.3 Keamanan Nasional

Keamanan nasional adalah kebutuhan dasar bagi suatu bangsa untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional. Kepentingan nasional menjadi suatu faktor utama dalam konsep keamanan nasional suatu bangsa. Selain menjaga dan melindungi, keamanan nasional juga bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan eksistensi negara. Konsep keamanan menekankan peran pemerintah dalam melindungi integritas teritorial negara dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Definisi keamanan nasional pada masa Perang Dunia dan Perang Dingin adalah ketergantungan negara akan kekuatan militer. Perubahan definisi keamanan nasional sendiri berubah semenjak globalisasi telah mencakup semua lapisan masyarakat. Ancaman tidak lagi berupa ancaman militer, melainkan fenomena-fenomena kerusakan lingkungan,

perkembangan teknologi informasi komunikasi dan ancaman dari aktor-aktor non-state (Sekjen Wantanas, 2010: 9-10).

Berbagai konsepsi ancaman keamanan di atas selain menunjukkan adanya perluasan makna dari perspektif tradisional menuju non tradisional, juga melibatkan aktor yang beragam (non-state) yang terlihat dari dinamika interaksi antara aktor dan sektor keamanan. Tingkat kerumitan dari sifat dan struktur sistem internasional yang dihasilkan oleh interaksi para aktor yang semakin tinggi, memunculkan pula beberapa alat analisa tambahan lainnya yang digunakan untuk mengkaji tipe aktor dan interaksi keamanan yang dihasilkan (Perwita, 2008: 10).

2.4 Cyber Security

Cyber space didefinisikan sebagai media elektronik dan jaringan komputer di mana komunikasi terjadi secara online. Komunikasi yang terjadi dalam cyber space bisa melibatkan siapa saja, kapan saja, dan dari mana saja selama media komunikasi memungkinkan. Berbeda dengan darat, laut, dan udara yang memiliki batasan jelas sebagai wilayah teritorial sebuah negara, cyber space tidak memiliki batasan tersebut dan menjadi entitas baru dalam national security.

Menurut Dewi Triwahyuni dalam Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi mengatakan Ada banyak terminologi dan interpretasi yang dihubungkan dengan konsep "cyber security" atau "keamanan cyber". Karena cyberspace merupakan ruang virtual yang terbentuk dari hasil penyatuan antara manusia dan teknologi. Teknologi yang dimaksud ialah teknologi informasi dan komunikasi. Maka konsep keamanan cyber tidak lagi hanya menyentuh wilayah teknologi tapi telah menjadi ancaman terhadap keamanan nasional (Triwahyuni, 2016: 110).

2.5 Kepentingan Nasional

Setiap langkah yang diambil para pembuat keputusan (decision makers) dalam

merumuskan kebijakan luar negerinya (foreign policy) harus sesuai dengan kepentingan nasional dan di arahkan untuk mencapai serta melindungi cita-cita kepentingan nasional itu.

Kepentingan nasional Tiongkok dapat diklasifikasikan menjadi :

1. Kepentingan politik
2. Kepentingan keamanan
3. Kepentingan ekonomi
4. Kepentingan budaya

1. Kepentingan politik Tiongkok yang utama adalah menjadi negara nomor satu di regional asia , baik itu di sektor ekonomi maupun sektor keamanan, bisa kita lihat bahwa sektor ekonomi merupakan poros utama dalam kepentingan politiknya, jadi kepentingan politik dan ekonomi negara Tiongkok tidak dapat dipisahkan.

2. Kepentingan keamanan Tiongkok menjadi perhatian besar oleh pemerintahan Tiongkok dilihat dari kenaikan sebesar 600% dari tahun 2000-2014 (diakses <http://www.artileri.org/2014/03/Tiongkok-tingkatkan-anggaran-pertahanan-asia-pasifik-memanas.html> pada tanggal 5 Juni 2017). Tiongkok melakukan hal ini dikarenakan Amerika menggunakan anggaran paling besar untuk sektor keamanan, agar tercipta balance of power.

3. Kepentingan Tiongkok menitik beratkan di sektor ekonomi, ekonomi yang menjadi poros utama dari politik luar negeri Tiongkok, Tiongkok beranggapan bahwa dengan kuat nya sektor ekonomi maka semua sektor akan menyusul menjadi kuat. Bisa dilihat bahwa hampir semua perusahaan besar di dunia melakukan produksi di negara Tiongkok untuk menekan biaya produksi, dengan catatan menggunakan bahan baku dari negara Tiongkok.

4. Kepentingan budaya Tiongkok tidak bisa kita lepaskan dari keseharian kita, hampir dari semua negara di dunia terpengaruh budaya dari Tiongkok, sebut saja makanan mie yang berasal dari Tiongkok. Dan penyebaran warga negara Tiongkok di berbagai negara, hampir di seluruh negara di dunia mempunyai Tiongkok Town yakni pusat kebudayaan negara

Tiongkok di suatu daerah atau negara (Yan, 2012 : 19).

2.6 Kebijakan Luar Negeri

Breuning (2007) dalam tulisannya yang berjudul *Foreign Policy Analysis A Comparative Introduction* menyebutkan bahwa terdapat tiga hal penting untuk memahami kebijakan luar negeri secara utuh, karena kebijakan luar negeri tidak bisa hanya dinilai dari satu sudut pandang saja. Ketiga hal tersebut adalah individual level analysis, state level analysis, dan system level analysis. Dengan memahami ketiga bagian ini kita akan mampu memahami hubungan komparasi dalam segi pembuatan keputusan, perilaku kebijakan luar negeri, dan interaksi antar negara. Bagian inilah yang dikenal sebagai comparative methods. Metode ini sangat penting sebagai bahan pertimbangan mengenai pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negeri dan untuk merespon dengan tepat terkait dengan tindakan aktor lain. Tujuan utama dilakukannya perbandingan kebijakan luar negeri adalah untuk mendapatkan pengetahuan umum tentang bagaimana kebijakan luar negeri dibuat, mengapa pemimpin membuat keputusan tersebut, mengapa negara terlibat dalam perilaku kebijakan luar negeri tertentu, serta untuk menilai peluang dan kendala didalam sistem internasional (Breuning, 2007: 11–17).

2.7 Multinational Corporations (MNCs)

Perusahaan multinasional (PMN, mengacu pada multinational corporation atau MNC) menurut W. F. Schoel et. al. (1993) adalah sebuah perusahaan yang berbasis di satu negara (disebut negara induk) dan memiliki kegiatan produksi dan pemasaran di satu atau lebih negara asing (negara tuan rumah).

Menurut Kamus Ekonomi, perusahaan multinasional adalah “sebuah perusahaan yang wilayah operasinya meliputi sejumlah negara dan memiliki fasilitas produksi dan pelayanan diluar negaranya sendiri. Perusahaan

multinasional tersebut mengambil keputusan pokoknya dalam suatu konteks global dengan negara-negara tempat perusahaan tersebut bekerja. Pertumbuhan perusahaan-perusahaan multinasional yang cepaat serta memungkinkan bahwa dapat timbul konflik-konflik antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan negara individual tempat mereka beroperasi telah menimbulkan macam-macam perdebatan antara para ahli ekonomi paada tahun-tahun belakangan ini. (Anorogo, 2009 : 85)

2.8 Internet Censorship

Keberadaan sistem komunikasi via internet membawa perubahan yang sangat besar terhadap studi Hubungan Internasional. Fenomena yang nampak dari kemunculan internet ini adalah kemunculan komunitas-komunitas maya yang menghubungkan individu dan masyarakat dari suatu negara secara paralel dengan individu dan masyarakat dari negara lain. Teknologi internet ini juga telah mentransformasi pandangan ilmuwan politik tentang negara. Konsep negara modern yang mengisyaratkan bahwa negara adalah komunitas yang memiliki penduduk yang tetap, wilayah yang tetap, pemerintahan yang tetap, serta otonomi kekuasaan politik dan hubungan internasional pada institusi pemerintahan kini tidak lagi mampu menjawab tantangan perubahan zaman yang memunculkan ‘masyarakat maya’ atau jaringan individu berbagai bangsa dan etnis. Masyarakat maya ini menggunakan ruangruang cyber untuk saling bertukar informasi, menjalin hubungan kekerabatan, melakukan transaksi ekonomi dan bisnis, hingga operasi tindak-tanduk kejahatan baru dengan skala global yang sulit dikontrol oleh negara.

Permasalahan baru bermunculan dalam ruang cyber ini seperti kemunculan kejahatan dan penipuan bentuk baru contohnya hacker, serangan virus terhadap situs pemerintah dan bisnis, situs porno yang menyediakan jasa seks virtual, penipuan bisnis daring, pembobolan akun bank, hingga kejahatan multidimensional seperti cyber terrorism. Negara merespon

masalah tersebut dengan pembentukan departemen yang membuat regulasi teknologi informasi dan unit khusus di kemiliteran dan kepolisian yang menangani kejahatan maya ini. Korporasi pun merespon hal ini dengan pembentukan lembaga khusus di bidang pengembangan situs dan teknologi informasi.

2.9 Peranan *Information and Communication*

Fenomena kebangkitan ICT menciptakan era baru yang disebut era informasi. Dengan dimulainya era ini maka sangatlah penting penguasaan di bidang ICT dan segala bidang terkait untuk dikuasai negara-negara dunia karena perkembangan ICT sendiri dirasa telah menimbulkan kerawanan dan ketergantungan kepada negara industri maju. Yang baik di suatu negara dapat meningkatkan daya interaksi antar masyarakatnya yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas industri finansial dan militer suatu negara. Sylvia Octa Putri memaparkan bahwa dalam kajian Hubungan Internasional dengan penguasaan ICT jalan suatu negara untuk menyebarkan power dan influence ke negara lain menjadi semakin mudah. Sayangnya terjadi disparitas kepemilikan kapabilitas di sektor ICT antara satu negara dengan negara yang lain atau antara kelompok negara maju dengan negara berkembang dan tertinggal (Putri, 2015 : 130).

Misalnya Bagaimana negara-negara Afrika mencoba mengatasi ICT di segala sektor namun terkendala masalah energi dalam distribusi listrik sehingga digitalisasi penerapan teknologi ICT bahkan arus informasi sulit dilakukan. Bagi negara dengan tingkat kapabilitas ICT yang tinggi maka mereka akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk dapat memanipulasi aliran informasi internasional. Hal itu berarti bahwa kelompok negara maju memiliki akses informasi dan kesempatan yang lebih besar untuk menyebarkan kekuasaan dan pengaruhnya ke negara lain, termasuk melakukan ekspansi budaya. Adanya disparitas dalam aliran

informasi secara salah pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya sebuah hubungan yang asimetris antara negara-negara dengan kapabilitas ICT kuat dan yang lebih lemah (Putri, 2015: 130).

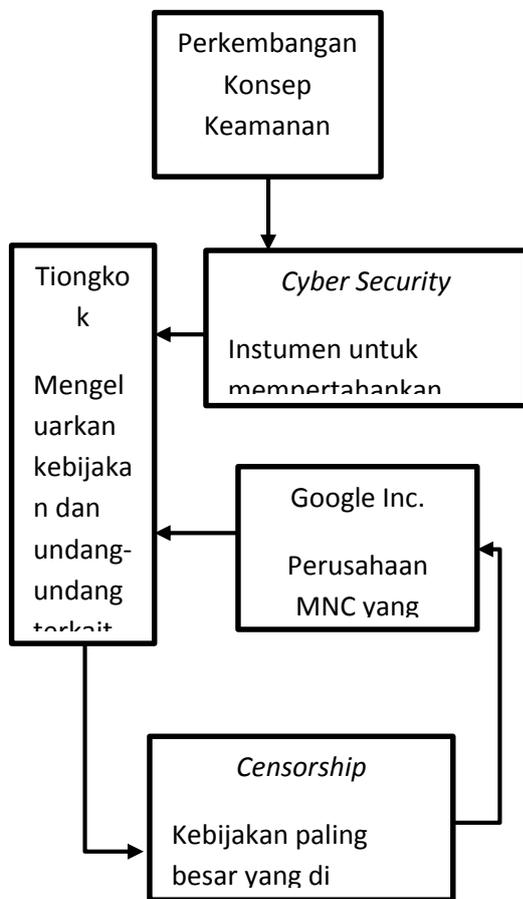
3.0 Kerangka Pemikiran

Cyber security yang merupakan bentuk perkembangan dari konsep keamanan memang menjadi perhatian besar hampir seluruh negara-negara di dunia. Yang awalnya ruang lingkup keamanan suatu negara hanya mencakup 3 sektor keamanan yaitu keamanan darat, keamanan laut, dan keamanan udara, sekarang bertambah dengan adanya cyberspace sebagai konsep baru wilayah keamanan suatu negara. Cyberspace sendiri tidak seperti sektor lainnya yang dapat dilihat secara langsung, tetapi cyberspace adalah suatu sektor keamanan yang bentuknya maya dan tidak terlihat tetapi tetap harus di jaga atas dasar keamanan nasional.

Negara Tiongkok dalam menjaga keamanan cyber mengeluarkan banyak kebijakan hanya untuk menjaga keamanan cybernya, salah satu dari banyak kebijakan tersebut adalah dengan mengeluarkan kebijakan censorship. Censorship di negara Tiongkok ini berkenaan dengan bahaya penyebaran informasi yang terlalu bebas dan tidak terkontrol dan tentu saja dapat menimbulkan kesalah persepsi di masyarakat yang notabene adalah rakyat Negara Tiongkok.

Censorship internet di negara Tiongkok sendiri menimbulkan perlawanan dari berbagai pihak, baik itu state actor maupun nonstate actor. Amerika Serikat sebagai state actor paling mengecam atas kebijakan Tiongkok yang dinilai melanggar kebebasan rakyatnya untuk menerima informasi, dan ada Google inc. sebagai non state actor yang merasa dirugikan atas kebijakan dari Pemerintah Tiongkok. Keadaan ini membuat terjadinya istilah cyber warfare antara negara Tiongkok dan perusahaan MNC milik Amerika Serikat yaitu Google inc.

Gambaran singkat kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat dari gambar berikut:



Gambar 2.1

Model Kerangka Pemikiran

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Objek Penelitian

3.1.1 Gambaran Umum Pemerintah Tiongkok

Secara politik, Tiongkok masih tetap menjadi pemerintahan satu partai. Menurut definisi resminya, RRT merupakan suatu negara yang berhaluan komunis dan hal itu memang karena Tiongkok merupakan negara komunis abad ke-20 yang lalu. Secara resmi Tiongkok masih dikenal sebagai negara komunis, meskipun sejumlah ahli tidak berpandangan bahwa Tiongkok merupakan negara komunis seutuhnya. Hingga saat ini tidak ada definisi yang tepat yang dapat diberikan kepada jenis pemerintahan yang dilaksanakan oleh Tiongkok, karena strukturnya tidak dikenal pasti. Salah satu

penyebab masalah ini adalah karena sejarahnya, Tiongkok merupakan negara yang diperintah oleh para kaisar selama 2000 tahun dengan sebuah pemerintahan pusat yang kuat dengan pengaruh Kong Hu Cu. Setelah tahun 1911, Tiongkok diperintah secara otokratis oleh KMT dan beberapa panglima perang dan setelah 1949 didobrak partai komunis Tiongkok.

Pemerintah RRT sering dikatakan sebagai otokratis, komunis dan sosialis. Ia juga dilihat sebagai kerajaan komunis. Anggota komunis yang bersayap lebih ke kiri menjulukinya negara kapitalis. Memang, negara Tiongkok semakin lama semakin menuju ke arah sistem ekonomi bebas. Dalam suatu dokumen resmi yang dikeluarkan baru-baru ini, pemerintah menggariskan administrasi negara yang demokratis, meskipun keadaan sebenarnya di sana tidak begitu (Thompson, C, 2007: 58).

3.1.2 Typologi Neraga Tiongkok Terhadap Censorship

Tiongkok merupakan negara yang memiliki paham komunis. Alhasil semua sistem politik Tiongkok pun diatur oleh negara, dan warga negara yang menentang akan dihukum. Hal inilah yang menjadi ciri khas utama dari negara dengan sistem komunis, di mana pemerintah menjadi pemegang kendali akan kebijakan politik. Tiongkok pernah membungkam atau mengekang pers di negaranya sendiri. Menurut data yang dikumpulkan organisasi reporter lintas negara, menunjukkan sampai 1 Januari 2006 lalu jumlah wartawan yang ditahan di Tiongkok sebanyak 32 orang. Tampak jelas kalau media diberi pengawasn yang ketat. Pembredelan dan penyitaan terhadap media juga biasa dilakukan oleh pemerintahan (diakses <https://www.onlenpedia.com/2016/12/semua-tentang-sistem-ekonomi-negara.html> pada tanggal 11 Desember 2017).

Dilihat dari sistem pemerintahan yang komunis dimana pada saat negara Tiongkok mengeluarkan suatu kebijakan, dalam bahasan

ini adalah kebijakan censorship, tentu saja tidak akan dapat dibendung dikarenakan negara Tiongkok menganut paham komunis, negaralah yang memegang kendali atas politik. Di saat negara Tiongkok mengeluarkan kebijakan censorship, yang dalam bahasan ini merugikan google sebagai sebuah perusahaan multinasional, google tidak dapat berbuat apapun dalam menghadapi kondisi seperti ini terutama di negara Tiongkok.

Ditambah dengan sistem ekonomi Tiongkok yang bertolak belakang dengan sistem pemerintahannya yaitu menganut sistem kapitalis, menjadi alasan yang kuat terhadap apa yang Tiongkok lakukan dalam menjalankan kebijakannya. Kebijakan censorship yang di berlakukan oleh Tiongkok tidak hanya berdasarkan unsur politik di dalamnya, tetapi juga memiliki latar belakang unsur ekonomi yaitu dalam rangka menopang perusahaan-perusahaan lokal agar dapat berjaya di negara Tiongkok, dalam bahasan ini adalah perusahaan Baidu.

3.1.3 Internet Di Negara Tiongkok

Warga netizen dunia barat melihat internet sebagai alat untuk kebebasan berbicara dan kemajuan demokrasi dalam rezim non-liberal. Negara Tiongkok tidak melihat kebutuhan akan hal ini, khususnya kesenjangan antara realitas politik dan asumsi barat tentang kekuatan Internet di Tiongkok. Perdebatan mengenai politik di ranah internet secara umum dapat dikatakan bahwa Internet dapat menjadi alat untuk demokratisasi serta penahanannya. begitu banyak ahli teori berasumsi bahwa demokratisasi Tiongkok harus mengikuti lintasan demokrasi yang mapan (Lagerkvist, 2006 : 18).

Tiongkok telah mencurahkan sumber daya yang luas untuk membangun salah satu sistem penyaringan yang paling canggih dan terbesar di dunia. . seperti catatan internet pertumbuhan layanan yang luar biasa Begitu juga jumlah pengguna, orang Tiongkok pemerintah telah melakukan pembatasan akses ke konten yang mungkin berpotensi merongrong kontrol negara atau stabilitas sosial

dengan menempuh ketat pengawasan media dalam negeri, kewajiban yang didelegasikan untuk penyedia konten online, dan, semakin, pendekatan propaganda debat online dan diskusi.

Tiongkok sedang mengembangkan jalur politik yang tidak terduga, sesuai dengan teori konvensional tentang demokratisasi, modernisasi dan globalisasi. Karena dalam praktiknya, politik Tiongkok tidak sesuai dengan model pemikiran yang mapan, situasi di Tiongkok selalu dijelaskan sebagai sesuatu yang langka atau tidak biasa, Oleh karena itu, beasiswa saat ini telah jauh melampaui prediksi sederhana dan sedang menguji dinamika dan penggunaan sosio budaya dan politik yang lebih halus dari media baru ini melalui fokus pada praktik kolektif baru dan aktivisme yang berada di dunia maya negara Tiongkok (Zheng, 2008 : 46).

Memang benar bahwa aktifitas penelusuran web di Tiongkok sangat populer dan popularitasnya menunjukkan tanda-tanda awal, setidaknya, liberalisasi politik di dunia maya Tiongkok. The blogosphere Tiongkok menikmati tingkat otonomi tertentu dan kebebasan dari penyensoran. Tentu saja, beberapa dari apa yang sebelumnya disebut ideologi politik yang salah saat ini lebih ditolerir di blogosfer Tiongkok. Namun, liberalisasi politik tidak sama dengan demokratisasi politik. Untuk alasan ini saja, kemungkinan perubahan struktural di Tiongkok saat ini tidak bisa digambarkan setinggi-tingginya. Meski Internet telah menjadi alat demokrasi dalam setting politik lainnya, meski Internet juga bisa menjadi alat untuk penahanan demokrasi. Internet hanya satu di antara banyak alat atau faktor dalam pengembangan struktur demokrasi (Lagervist, 2006 : 18).

Faktor lain seperti konteks sosio-kultural, kontrol ideologis dan kepemimpinan sama pentingnya. Dengan demikian, potensi dampak demokratisasi Internet perlu dibuktikan dengan faktor lain dan berada dalam rentang situasi yang lebih luas, seperti kekuatan sosio-politik untuk strategi nasionalisme dan pemerintahan. Oleh karena itu buku ini

berfokus pada memeriksa implikasi politik Internet di Tiongkok dengan berkonsentrasi pada faktor-faktor yang lebih besar dan mendasar yang terkait, yaitu wacana nasionalisme, penyensoran, dan pemerintahan, dan bagaimana mereka secara unik bergabung untuk mempengaruhi jalur tertentu yang Tiongkok tampaknya telah memulai.

3.1.4 Revolusi Teknologi Informasi Di Tiongkok

Tiongkok telah mengeluarkan sumber daya yang besar untuk membangun salah satu sistem penyaringan terbesar dan paling canggih di dunia. Seperti halnya Internet, pemerintah telah membatasi akses terhadap konten yang berpotensi merusak kendali negara atau stabilitas sosial dengan melakukan pengawasan ketat media dalam negeri, membuat kebijakan yang ditunjukkan kepada penyedia konten online dan meningkatkan pendekatan propaganda untuk debat online serta diskusi. Penyatuan Kongres Partai Komunis Tiongkok Ke-17 (PKT) pada bulan Oktober 2007, di mana pemimpin tertinggi di pemerintah Tiongkok memilih penerus terbarunya, merupakan awal dari tahun penting bagi Tiongkok, dan berdampak bagi media berita domestik dan internasional. Pada tanggal 10 Maret 2008, ratusan biksu di wilayah otonomi Tibet memimpin serangkaian demonstrasi untuk menuntut pelonggaran pembatasan praktik keagamaan dan bahkan kemerdekaan untuk Tibet. Pihak berwenang Tiongkok dengan cepat menanggapi dengan penangkapan dan tindakan keras terhadap ribuan biksu dan kerusakan orang Tibet. Pelanggaran yang sesuai atas pelaporan dari wilayah tersebut dan daerah berpenduduk Tibet lainnya di bagian barat Tiongkok meninggalkan media dengan kekurangan informasi yang dapat dipercaya; akun resmi dan kiriman yang dikeluarkan oleh organisasi pengasingan Tibet memberikan isu-isu seperti kenyataan jumlah korban tewas menjadi sebuah tanda tanya besar.

Tindakan keras di Tibet melaksanakan protes baik untuk mendukung dan menentang kebijakan Tiongkok terhadap kelompok

minoritas agama dan etnisnya, terutama yang dilambangkan dalam obor Olimpiade yang membuat jalannya dalam tur yang rumit di seluruh dunia. Konflik yang meletus di kota-kota yang jauh seperti Paris dan Seoul pada bulan Maret dan April memberi kontribusi pada apa yang disebut reaksi balasan transnasional Tiongkok terhadap penggambaran media Barat di Tiongkok, yang berpuncak pada gerakan "anti-CNN" dan seruan untuk memboikot supermarket Prancis yaitu Carrefour.

Didorong oleh tujuan kebijakan bahwa 'setiap desa memiliki akses ke telepon dan setiap kota memiliki akses ke Internet' pada tahun 2010, pembangunan infrastruktur telah memperluas akses Internet broadband ke 92 persen kota. Jenis kelamin juga merupakan faktor demografis yang penting dalam perpecahan perkotaan-pedesaan, dengan pengguna laki-laki pedesaan melebihi jumlah perempuan sebesar 15 persen. Pengguna internet berusia antara 10 dan 19 tahun meningkat di tahun 2008 menjadi 35 persen dari semua pengguna dan melewati kelompok usia 20-29 yang menjadi demografis terkemuka pengguna Internet.

Dengan cakupan dan rentang topik yang tipis - dari novel online sampai situs streaming video, internet tidak dapat diabaikan sebagai medan pertempuran untuk menyebarkan opini publik dan sentimen. Seringkali, insiden yang menjadi populer (mendapatkan popularitas yang luas berdasarkan penyebarannya di Internet) kemudian terlempar ke dalam keunggulan nasional, yang sering menyebabkan seruan untuk tindakan dan respons pemerintah. Menurut Hu Yong, seorang profesor jurnalistik, liputan khusus oleh portal online, komentar ekstensif mengenai bentuk diskusi, dan potensi desas-desus Internet yang bergema kembali ke media tradisional mendorong konvergensi di industri komunikasi - terutama dalam memunculkan acara media baru. Hal ini sering berakibat pada konsekuensi bagi pejabat, pelaku bisnis, atau selebriti yang terlibat.

Meningkatnya keunggulan upaya kolektif melalui Internet untuk menargetkan

dan mengekspos data pribadi, yang dikenal sebagai 'mesin pencari daging manusia', tampaknya melayani selera rakus dalam komunitas online Tiongkok untuk akuntabilitas pribadi. Menurut Xinhua, fenomena ini berawal pada tahun 2001, ketika seorang pria memajang gambar seorang wanita yang dia klaim sebagai pacarnya di portal Mop.com, dan pengguna Internet lainnya mengidentifikasinya sebagai model untuk Microsoft, membuktikan bahwa dia pembohong. Mereka dapat melakukan penyelidikan sesegera mungkin seperti mencari sanak keluarga yang hilang, tapi kadang-kadang menyimpang ke tindakan waspada yang melibatkan ancaman dan pelecehan. Pada tahun-tahun sebelumnya, mesin pencari daging manusia telah mencetak serangkaian keberhasilan dalam mengidentifikasi petugas korup yang telah melakukan tindakan memalukan atau menyalahgunakan kantor mereka (dan sering kemudian dihukum), serta menyerang orang-orang secara pribadi yang terlibat dalam tindakan yang tidak menyenangkan. Kelonggaran jaringan ini mampu meluncurkan kampanye melawan orang-orang lain.

Interaksi antara struktur pengawasan media yang horizontal (atas-bawah) dan lingkungan online yang lebih rawan dan tidak dapat diprediksi juga telah berkontribusi pada munculnya sejumlah fenomena yang unik bagi cyberspace Tiongkok. Partai yang disebut Fifty Cent Party, sebuah istilah yang mengacu pada 280.000 komentator Web yang diperkirakan berjumlah 280.000 yang dengan tekun mendukung PKC dan pada awalnya dikabarkan mendapatkan 50 sen per pos, secara langsung diselenggarakan oleh pemerintah untuk memandu opini publik secara online. Hal ini bermula dari Universitas Nanjing pada tahun 2005, di mana siswa direkrut dengan dana studi untuk mengadvokasi jalur partai di forum pelajar online, dan telah dilembagakan oleh Kementerian Kebudayaan dalam mengembangkan pelatihan komentator Web (lengkap dengan ujian dan pekerjaan sertifikasi) dan situs Web utama diharuskan memiliki tim internal dari komentator terlatih

dari pemerintah. Untuk sementara pemerintah terus melakukan intervensi agresif dalam liputan media berita, anggota Fifty Cent Party ini terus bertambah banyak karena PKC juga mulai mengenali potensi dan manfaat pendekatan humas terhadap wacana-wacana online.

3.1.5 Perkembangan Internet di Tiongkok

Tiongkok merupakan salah satu negara yang sangat maju dalam perkembangan teknologi dan informasi, ini terbukti dengan antusiasme yang ditunjukkan masyarakat Tiongkok terhadap perkembangan teknologi komunikasi khususnya dalam penggunaan internet. Harapan terbesar bagi masyarakat Tiongkok adalah kebebasan dalam melakukan akses internet secara global. Pada tahun 1999, jumlah pengguna internet di Tiongkok sebanyak 9 juta jiwa, jumlah ini akan tumbuh menjadi 27 juta pada akhir tahun 2000 dan terus meningkat hingga 128 juta pada tahun 2004, angka ini yang akan membentuk pengguna internet di Tiongkok sebagai salah satu yang terbesar di dunia.⁷ Jumlah penduduk di Tiongkok yang meningkat berdampak pada jumlah pengguna internet yang bertambah semakin besar.

Rezim pemerintah mengetahui bahwa internet diperlukan untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan dapat menjadi investasi besar-besaran dalam infrastruktur kemajuan teknologi. Namun sebagian dari pejabat pemerintah mengatakan bahwa dengan adanya dukungan internet yang bebas dapat meruntuhkan rezim pemerintahan. Dengan kapasitas internet untuk mempromosikan kebebasan berbicara dan perbedaan pendapat politik, Internet dapat merusak dan akhirnya menghancurkan rezim seperti membuka komunikasi (fax dan e-mail) secara luas dapat membantu menurunkan kudeta militer yang dialami oleh pemerintah Soviet pada tahun 1991 (di akses <http://www.slideshare.net/firmansyahw/statistik-internet-tahun20102011-di-dunia-danindonesia> pada tanggal 11 Desember 2017).

Para pendukung pandangan ini berpendapat bahwa tidak mungkin untuk menekan perbedaan pendapat di internet. Pemerintahan komunis Tiongkok tidak menginginkan warganya terlalu bebas memperoleh informasi baik dari mesin pencari Google maupun media sosial yang dianggapnya dapat mengancam stabilitas dan keamanan negara Tiongkok (dilihat dari sisi pemerintah Tiongkok hal ini telah terbukti melihat pemberontakan di Mesir dan Libya yang dibantu penyebaran informasinya lewat media sosial), sehingga penyaringan informasi merupakan aturan yang sangat ketat di negeri Tiongkok.

3.1.6 Gambaran Umum Google.inc

Google LLC adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkekhususan pada jasa dan produk Internet. Produk-produk tersebut meliputi teknologi pencarian, komputasi web, perangkat lunak, dan periklanan daring. Sebagian besar labanya berasal dari AdWords. Google didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin saat masih mahasiswa Ph.D. di Universitas Stanford. Mereka berdua memegang 16 persen saham perusahaan. Mereka menjadikan Google sebagai perusahaan swasta pada tanggal 4 September 1998. Pernyataan misinya adalah "mengumpulkan informasi dunia dan membuatnya dapat diakses dan bermanfaat oleh semua orang", dan slogan tidak resminya adalah "Don't be evil". Pada tahun 2006, kantor pusat Google pindah ke Mountain View, California. (diakses <https://id.wikipedia.org/wiki/Google> pada tanggal 11 Desember 2017).

3.1.7 Liberal Vs Komunis

Google yang mengusung nama Amerika Serikat sebagai negara asalnya saat mencoba menjajaki tanah Tiongkok yang notabene adalah antithesis dari liberal yakni negara komunis tidak bisa menerapkan sebuah praktek dari liberal itu sendiri di Tiongkok. Dimana Amerika yang terkenal dengan

keterbukaan dan transparansi nya di dalam segala hal mencoba di terapkan oleh google melalui produk-produknya yang mengusung internet freedom atau kebebasan berinternet di negara Tiongkok yang memiliki paham komunis yang artinya sangat tertutup dan ketat bila menyangkut hal-hal yang sensitif, apalagi bila hal tersebut berbau tidak pro pemerintah Tiongkok. Di sini terjadi benturan antara dua paham yang sangat bertentangan melalui Google yakni perusahaan asal Amerika Serikat dan negara Tiongkok.

Dimana Liberal sangat menjunjung tinggi kebebasan serta keterbukaan, sedangkan komunis lebih kearah yang sangat tertutup. Walaupun tidak secara langsung terjadi antara dua state actor dalam konflik ini, melainkan terjadi sebuah perusahaan multinasional yang notabene adalah nonstate actor melawan state actor yaitu Tiongkok.

3.2 Analisa Hasil Penelitian

3.2.1 Respon Google Terhadap *Censorship* Yang Dilakukan Tiongkok

Google telah berusaha untuk melakukan gencatan senjata dalam perangnya melawan Tiongkok terkait kebijakan censorship yang di lakukan oleh Tiongkok. Perusahaan multinasional itu telah memindahkan operasinya dari daratan Tiongkok ke Hong Kong, dimana di Hong Kong kebijakan censorship tersebut tidak berlaku. Itu adalah salah satu usaha Google yang paling berhasil untuk meredakan pertempuran dengan Tiongkok terkait censorship yang telah di lakukan sejak tahun 2006. Pengguna situs Google bahasa Tiongkok sekarang diarahkan ke situs web di Hong Kong, yang tanpa sensor. Ini adalah solusi yang masuk akal untuk tantangan yang Google hadapi.

Puncaknya di tanggal 22 Maret 2010 Google memindahkan operasinya dari Tiongkok ke Hong Kong, di mana peraturan penyensoran negara tidak berlaku. Tetapi usaha Google tidak berhenti sampai di situ saja , pada tanggal 9 Juni 2010 para eksekutif Google

mendesak pemerintah A.S. dan Eropa untuk memberi tekanan pada Tiongkok untuk menghapus kebijakan penyensorannya. Salah satu opsi yang diajukan adalah meminta pemerintah A.S. mengambil kasus penghalang perdagangan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Tetapi jalan yang ditempuh melalui WTO tidak bisa mengangkat kasus penyensoran di karenakan penyensoran terjadi di cyberspace, walaupun ini mengenai bisnis tetapi di luar jangkauan WTO. Perselisihan antara Google dan Tiongkok menjadi sebuah fenomena yang baru mengenai kedaulatan melawan budaya perusahaan dan etika ke tahap global.

3.2.2 Kerugian Google Terkait *Censorship* yang diberlakukan Oleh Tiongkok

Censorship yang di lakukan oleh Tiongkok terhadap Google terhitung dari tahun 2006 memang menjadi sebuah pukulan telak bagi perusahaan raksasa tersebut. Seperti yang kita ketahui, mesin pencari berbasis web yang paling banyak di gunakan oleh netizen di seluruh dunia adalah mesin pencari dari Google. Google.cn telah di hentikan aktivitasnya oleh pemerintah Tiongkok dan di gantikan keberadaanya oleh mesin pencari berbasis web lokal milik Tiongkok. Melalui kebijakan yang sering kita dengar sebagai The Great Firewall, pemerintah Tiongkok telah membuat dampak yang sangat besar bagi Google.

Pemerintah Tiongkok yang telah mengeluarkan kebijakan The Great Firewall memberikan dampak yang sangat negatif bagi perkembangan google di Tiongkok. Pengaruh politik yang diberikan oleh pemerintah Tiongkok terhadap google menjadi google seperti pelaku kriminal yang harus diawasi setiap saat. Filosofi google yang mengedepankan kebebasan serta melepaskan diri dari campur tangan politik telah membawa google pada sistem komunis yang dijalankan pemerintah Tiongkok. Google dan pemerintah Tiongkok selalu melakukan pembelaan tersendiri jika salah satu ada yang disalahkan, google merasa pemerintah Tiongkok telah jauh

mencampuri urusan internal dan sistem bisnis yang dijalankan google selama ini. Google selalu menjadi sasaran pemerintah jika terjadi pergeseran di kehidupan masyarakat Tiongkok. Informasi yang mudah diakses oleh masyarakat Tiongkok melalui google menjadi faktor utama pemerintah Tiongkok mengawasi google. Berkembangnya google di Tiongkok telah mengancam stabilitas politik dan kekuasaan pemerintahan komunis di Tiongkok..

3.2.3 Perkembangan Internet di Tiongkok Pasca Berpindahannya Google

Google memang tidak beroperasi lagi di tanah Tiongkok, Google telah memindahkan hamper semua layanan nya ke Hong Kong, di mana kebijakan censorship pemerintah Tiongkok tidak berlaku di Hong Kong. Di Hong Kong Google bebas menghadirkan konten-konten apapun tanpa terkecuali. Ini bukan berarti Google kalah dan tunduk terhadap pemerintah Tiongkok, tetapi merupakan sebuah langkah yang cerdas untuk mengakhiri pertikaian yang terjadi.

Google yang merupakan perusahaan raksasa yang dapat berjaya di mana saja di belahan dunia ini tetapi bisa di kalahkan oleh pemerintah Tiongkok, dengan bermodalkan sebuah kebijakan tetapi tertata dengan sangat baik dapat mengalahkan Google dalam kurun waktu kurang lebih 6 tahun. Meskipun tidak ada lagi google.cn tetapi masih terdapat google.hk yang berdiri tegak di bagian negara Tiongkok.

4 KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Perselisihan antara Google dan Tiongkok menjadi sebuah fenomena yang baru mengenai kedaulatan melawan budaya perusahaan dan etika ke tahap global. Apalagi konflik ini terjadi di cyberspace yang merupakan daerah baru kedaulatan sebuah negara. Memang sangat sulit mengukur batas-batas suatu negara di cyberspace, tetapi pemerintah Tiongkok memenangkan konflik yang bisa kita sebut sebagai cyberwar dengan

sebuah senjata yang sangat ampuh yaitu kebijakan censorship.

Dari perspektif hukum, cyberspace berada di wilayah yang belum dipetakan. Hukum cyber untuk menangani sengketa perbatasan dan kedaulatan tidak jelas. Bahkan organisasi internasional seperti World Trade Organization tidak akan bisa menyelesaikan perselisihan ini. Baik WTO maupun undang-undang perdagangan lainnya tidak dapat digunakan untuk menghilangkan penyensoran internet. Sisi lain dari perselisihan Google dan Tiongkok adalah percabangan bisnis. Tiongkok bukanlah salah satu penghasil uang yang tinggi untuk Google. Namun, potensi pendapatan Google di Tiongkok cukup besar. Pada saat yang sama, Tiongkok tidak mampu kehilangan Google mengingat rencana pengembangannya. Baik Google dan Tiongkok perlu melindungi kepentingan jangka panjang mereka.

Sifat perselisihan ini rumit. Internet yang merupakan bagian dari cyberspace telah secara drastis mengubah cara kita berinteraksi secara sosial dan melakukan bisnis. Internet telah membuat kita lebih terhubung dari sebelumnya. Karena kita terhubung di Internet, urusan pribadi, keuangan, dan hubungan internasional saling terkait. Perubahan dalam satu urusan akan mempengaruhi yang lain. Perselisihan meningkat karena beragam budaya dan sudut pandang etis. Konsep kedaulatan teritorial didasarkan pada "yurisdiksi geografis yang jelas dan saling eksklusif". Namun, internet tidak mengikuti konsep ini. Tidak ada batas fisik, kurangnya batasan dan kontrol fisik telah membuat beberapa negara bagian prihatin dengan kedaulatan mereka.

Tiongkok untuk menegaskan kedaulatan Internetnya dengan menyatakan, "di dalam wilayah Tiongkok, Internet berada di bawah yurisdiksi kedaulatan Tiongkok". Ini adalah hal yang wajar dilakukan oleh sebuah negara seperti Tiongkok agar tidak kehilangan kontrol terhadap pemerintah Tiongkok. Pemerintah Tiongkok melindungi warganya dari semua konten negatif dan memiliki kontrol ketat terhadap media. Di sisi lain, moto Google adalah "Jangan menjadi Jahat". Di barat,

kelompok media dan aktifis hak asasi manusia mempunyai pertimbangan untuk mematuhi undang-undang penyensoran. Oleh karena itu, ada konflik antara nilai dan kedaulatan. Seperti yang telah peneliti paparkan, nilai adalah konsep relatif. Budaya yang berbeda menafsirkan nilai secara berbeda. Misalnya, konsep yang baik seperti kebebasan dirasakan berbeda oleh masing masing kelompok. Dari perspektif etis, Google memilih untuk berjalan di jalur yang mencoba mengerti akan pemerintah Tiongkok dan berkompromi dengan nilai-nilai. Yaitu perusahaan harus bisa mengerti nilai-nilai bagi pemerintah Tiongkok demi kesesuaian dan keuntungan.

Populasi pengguna internet terbesar di dunia berasal dari Tiongkok. Jumlah penduduk yang mencapai 1,4 milyar jiwa berpengaruh dengan peningkatan pengguna internet di Tiongkok yang mencapai 538 juta jiwa pada tahun 2012. Hal inilah yang membuat perusahaan search engine terbesar di dunia yang berasal dari Amerika Serikat termotivasi untuk melakukan investasi di Tiongkok, berharap mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari jumlah pengguna internet di Tiongkok, google telah memasuki pangsa pasar Tiongkok pada tahun 1999 dengan kondisi asli google (google.com) telah mendapatkan simpati masyarakat hingga 25 %, namun pada tahun 2002 pemerintah Tiongkok telah memblokir google selama hampir satu bulan.

Pemerintah Tiongkok melakukan intimidasi terhadap google yang tetap menjalankan prinsipnya, pada akhirnya google menyerah dengan pemerintah Tiongkok. Tahun 2010 adalah akhir perjalanan google di Tiongkok, namun bukan meninggalkan Tiongkok secara total, google memindahkan seluruh server dari Beijing ke Hongkong. Hongkong yang tidak terikat dengan pemerintahan komunis Tiongkok telah memberikan kesempatan pada google untuk menjalankan bisnis, namun hal ini tetap tidak berpengaruh pada peningkatan pengguna google di Tiongkok karena secara umum pengguna internet Tiongkok lebih memilih Baidu sebagai search engine untuk menjelajahi

dunia maya. Baidu telah mendapat simpati bagi masyarakat Tiongkok. Perusahaan lokal yang didirikan untuk pengguna internet Tiongkok telah berkembang menjadi perusahaan besar karena mendapat dukungan dari pemerintahan komunis Tiongkok, baidu pada akhirnya telah menghapus dominasi google di Tiongkok dan menjadi search engine yang menguasai lebih dari 70% pengguna internet di Tiongkok. Kehilangan pangsa pasar di Tiongkok tidak berpengaruh besar pada perkembangan google, google masih menguasai sebagian besar benua Asia, Eropa, Amerika, Australia dan Afrika. Secara umum google hanya tidak mampu menguasai Tiongkok, namun google telah menguasai dunia.

Kebijakan censorship yang di buat oleh Tiongkok tidak semata-mata untuk kepentingan politik, melainkan ada unsur ekonomi di dalam kebijakan politik yang di buat oleh Tiongkok melalui censorship tersebut. Ini terbukti dari apa yang terjadi pada perusahaan google yang berpindah operasi baru dalam kurun lima hari, nilai saham baidu dapat melonjak lebih dari 90%. Sang pendiri Baidu juga yaitu Robin Li juga merupakan wakil ketua dari Internet Society of China (ISC) juga sebagai wakil ketua All China federasi industri dan perdagangan.

Google memang tidak beroperasi lagi di tanah Tiongkok, Google telah memindahkan hampir semua layanan nya ke Hong Kong, di mana kebijakan censorship pemerintah Tiongkok tidak berlaku di Hong Kong. Di Hong Kong Google bebas menghadirkan konten-konten apapun tanpa terkecuali. Ini bukan berarti Google kalah dan tunduk terhadap pemerintah Tiongkok, tetapi merupakan sebuah langkah yang cerdas untuk mengakhiri pertikaian yang terjadi.

4.2 Saran

Saran peneliti kepada Pemerintah Tiongkok sebagai berikut,

1. Pemerintah Tiongkok agar lebih sehat dalam melakukan persaingan terhadap perusahaan-perusahaan multinasional dalam rangka mengangkat perusahaan-perusahaan-perusahaan lokal milik negara Tiongkok

2. Pemerintah Tiongkok agar lebih baik dan bijak dalam menjalankan kebijakan censorshipnya, tidak hanya untuk semata-mata keuntungan negara tetapi demi kebaikan kelompok lainnya.
3. Pemerintah Tiongkok agar lebih menerima masukan-masukan dari pihak lainnya, tidak terlalu keras dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan maupun yang akan datang.

Saran peneliti kepada Pemerintah Tiongkok dan Google.inc adalah sebagai berikut,

1. Google agar lebih dalam menyusun strategi bisnis dan memikirkan hambatan apa yang akan menghampiri di kemudian hari agar tidak terjadi masalah terkait dengan kebijakan censorship di Tiongkok
2. Google agar lebih cerdas dalam melihat medan-medan dalam melakukan ekspansi ke negara-negara lain, karena sangatlah berbeda suatu negara dengan negara lainnya, agar tidak terjadi lagi konflik seperti yang terjadi di tanah Tiongkok.
3. Google agar lebih meningkatkan lagi layanan-layanan yang telah dimiliki agar apa yang sudah tercapai bisa lebih di maksimalkan di kemudian hari

Saran untuk para peneliti berikutnya yang mengambil tema sama dengan apa yang telah peneliti lakukan agar melengkapi apa yang masih kurang dan perlu di tambahkan. kajian tentang censorship yang telah peneliti lakukan di harapkan bisa dijadikan acuan untuk dikembangkan oleh para peneliti-peneliti yang lain di kemudian hari

5 REFERENSI

Buku

- Anorogo, Panji. 2009. *Manajemen Bisnis*. Semarang: PT.Rineka Cipta
- Breuning, Marijke. 2007. *Foreign Policy: Analysis Comparative Introduction*. New York: Palgrave MacMillan.

- Cheek, Timothy. 2006. *Living with Reform: China since 1989*. Nova Scotia: Fernwood Publishing
- Coulombis, Theodore A. dan Wolfe, James H. 2004. *Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan Power*, terjemahan Mercedes Marbun. Jakarta: Putra Abardin
- Darmayadi, Andrias. 2015. *Mengenal Studi Hubungan Internasional*. Bandung: Zavara
- Dugis, Vinsensio. 2007. *Analyzing Foreign Policy*. Jakarta: Grasindo.
- Hermawan. Yulius P. 2007. *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Jervis, Robert. 2005. *American foreign policy in a new era*. New York:Routledge New
- Mas'oeed, Maksum. 2000. *Kekerasan Kolektif: Kondisi dan Pemicu*, Yogyakarta. P3PK UGM.
- Nuechterlein, Donald E. 2005 *Defiant Superpower*
- Perwita, Anak Agung Banyu dan. Yanyan Mochamad Yani, 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Perwita, Anak Agung Bayu. 2008. *Pengantar Kajian Strategis*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Perwita, Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochamad Yani. 2014. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Plano, Jack C. 2000. *The Public Administration Dictionary*. John Wiley & Sons
- Putera, Ivan Tani. 2007. *History of China*. Yogyakarta: Ar- Ruzz Media.
- Puspoprano, Sawaldjo. 2009. *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan*. Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia.
- Rosenau, N James. 2010. *The Study of World Politics: Theoretical and methodological challenges*. Canada : Routledge.
- Supriyanto, Makmur. 2014. *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Thompson, C. 2006. *Google's China Problem (And China's Google Problem)*. The New York Times Magazine.
- Sumardi, Juajir. 2016. *Hukum Perusahaan Transnasional Dan Franchise*. Makasar: Arus Timur
- Wardoyo, Broto. 2015. *Perkembangan, Paradigma, dan Konsep Keamanan Internasional & Relevansinya untuk Indonesia*. Nugra Media
- Wolf, Martin. 2007. *Globalisasi jalan menuju kesejahteraan*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia
- Yan, Xue Tong. 2012. *Analysis of China National Interest*
- Zheng, Chui . 2008. *Nanofabrication: Principles, Capabilities and Limits*

Jurnal / Karya Ilmiah

- Lagerkvist, Amanda. 2016 *Existential media: Toward a theorization of digital thrownness dalam Jurnal Stockholm University Vol. 19*
- Putri, Sylvia Octa . 2015. *Kebijakan E-waste Management Pada Perguruan Tinggi berbasis ICT: Suatu Tinjauan Perspektif Green Thought Dan Hukum Lingkungan (Studi Kasus Universitas Komputer Indonesia (2007-2011))*, Dalam Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol. 3 No. 1. Universitas Komputer Indonesia
- Triwahyuni, Dewi & Tine Wulandari. 2016. *Strategi Keamanan Cyber Amerika Serikat*. Dalam Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol. IV No. 1. Universitas Komputer Indonesia

Dokumen

- Information Office of the State Council of the People's Republic of China, 2010, White paper – The Internet of China*
- Sekjen Wantanas. 2010. *Keamanan Nasional: Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan Bagi Bangsa Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jendral Dewan Ketahanan Nasional

Rujukan Elektronik

- Artileri.com,
<http://www.artileri.org/2014/03/Tiongko-k-tingkatkan-anggaran-pertahanan-asia-pasifik-memas.html> [05/06/2017].
- BBC, *Internet Freedom in China* Melalui
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/8727647.stm>
 [08/04/2017].
- Bristow, Michael. *China defends internet censorship*.
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/8727647.stm> [08/04/2017].
- CNN *Indonesia. Tiongkok Negeri Sejuta Sensor*.
<http://www.cnnindonesia.com/hiburan/20160902082851-220-155576/Tiongkok-negeri-sejuta-sensor/> [08/04/2017].
- CIW, *Search Internet Market in 2014*,
<https://www.chinainternetwatch.com/10594/search-engine-market-q3-2014/>
 [14/12/2017].
- Dimaz. *China bentuk organisasi cyber security pertama*.
<https://kriptologi.com/2016/03/27/china-bentuk-organisasi-cyber-security-pertama/> [08/04/2017].
- Financial Times. *China restricts access to foreign children's books*.
<https://www.ft.com/content/0e4f68be-056a-11e7-ace0-1ce02ef0def9>
 [08/04/2017].
- Firmansyah W . *Statistik Internet Tahun di 2011*
<http://www.slideshare.net/firmansyahw/statistik-internet-tahun-20102011-di-dunia-danindonesia>
 [11/12/2017].
- GreatFire.org. *Top 1000 Censored Domains in China*.
<https://en.greatfire.org/search/alexa-top-1000-domains> [08/04/2017].
- Hiluscious, aktor-aktor dalam HI. Melalui
<https://hiluscious.com/aktor-aktor-dalam-hubungan-internasional-hi>
 [08/04/2017].
- Internet Usage Stats and Population Statistics*,
<http://www.internetworldstats.com/stats>
 [08/04/2017].
- Internet Usage Stats and Population Statistics*,
<http://www.internetworldstats.com/stats3> [08/04/2017].
- Kriptologi.com,
<https://kriptologi.com/2016/03/27/Tiongkok-bentuk-organisasi-cyber-security-pertama/> [10/04/2017].
- Kristanti, Yunita. *Tiongkok-larang-perusahaan-asing-publikasikan-konten-online*. Melalui
<http://global.liputan6.com/read/2441298/Tiongkok-larang-perusahaan-asing-publikasikan-konten-online>
 [08/04/2017].
- Onlenpedia, *Sistem negara China*.
<https://www.onlenpedia.com/2016/12/se-mua-tentang-sistem-ekonomi-negara.html> [11/12/2018].
- TahuPedia, *10 Mesin Pencari Paling Terkenal*
<http://www.tahupedia.com/content/show/458/10-Mesin-Pencari-Paling-Terkenal> [08/04/2017].
- Techniasia, *Internet User in 2016*
<https://www.techinasia.com/china-731-million-internet-users-end-2016>
 [17/12/2017].
- RFS.org *most worst country with internet*
http://www.rsf.org/rubrique.php3?id_rubrique=50 [08/04/2017].
- Statista.com. *Worldwide desktop market share of leading search engines from January 2010 to January 2017*.
<https://www.statista.com/statistics/216573/worldwide-market-share-of-search-engines/> [08/04/2017].
- The Guardian Staff, *China sinks Dead Man's Chest*. Melalui
<http://film.guardian.co.uk/news/story/0,,1817089,00.html> [08/04/2017]
- United Nation,
<https://www.un.org/ruleoflaw/blog/document/the-secretary-generals-high-level-panel-report-on-threats-challenges-and-change-a-more-secure-world-our-shared-responsibility/> [08/05/2017]
- Wallstreet. *Most Popular American Companies in China*.
<http://247wallst.com/special-report/2012/01/03/the-most-popular-american-companies-in-china/2/>
 [08/04/2017].

Wikipedia, Google Melalui
<https://id.wikipedia.org/wiki/Google>
[08/04/2017].